

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN DARI TINDAKAN KEKERASAN OLEH PENYIDIK PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI POLRESTA BUKITTINGGI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana*

Oleh:

DIMAS LUTHFI HADI

1910112152

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK-IV)



Pembimbing :

**Tennofrimer, S.H., M.Si
Diana Arma, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 22/IV/II/2024

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN DARI TINDAKAN KEKERASAN OLEH PENYIDIK PADA TAHAP PEMERIKSAAN DI POLRESTA BUKITTINGGI

(Dimas Luthfi Hadi, 1910112152, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 Halaman, Tahun 2024)

ABSTRAK

Negara Hukum adalah Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap warga negaranya. Negara melalui undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin hak asasi manusia itu sendiri. Namun yang terjadi pada masa sekarang ini, Negara cenderung gagal dalam perlindungan HAM. Kegagalan perlindungan HAM paling nyata kita lihat dimasa sekarang adalah banyaknya kasus penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana. Disisi lain, penyidik dalam melaksanakan tugasnya sudah dipandu oleh Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebenarnya peraturan ini cukup mengawal tugas penyidik, namun saat ini, penerapan peraturan ini belum juga optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang akan diteliti pertama Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Dari Tindakan Kekerasan Oleh Penyidik Pada Tahap Pemeriksaan di Polresta Bukittinggi, kedua Akibat Hukum Terhadap Oknum Penyidik Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Pada Tahap Pemeriksaan di Polresta Bukittinggi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara dan data sekunder dari studi pustaka. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, pelaksanaan perlindungan terhadap tersangka yang mengalami tindakan kekerasan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan di Polresta Bukittinggi tidak optimal dan cenderung menggunakan kekerasan dalam mengungkap informasi dari tersangka. Akibat hukum terhadap oknum penyidik yang melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka juga tidak diatur dengan jelas, dan hanya dikenakan sanksi kode etik Polri berupa demosi/mutasi padahal seharusnya dimungkinkan diberi sanksi yang berat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tersangka, Tindak Pidana Pencurian, Tindakan Kekerasan, Polresta Bukittinggi